

***LAPORAN***  
***AKUNTABILITAS KINERJA***  
***INSTANSI PEMERINTAH***  
***TAHUN 2022***



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan salah satu unsur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumen LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian dokumen LKjIP kami sampaikan, semoga dokumen LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Palu. Februari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH.**



**Dr. FANRUDIN. S.Sos. M.Si**  
Pemoma Utama Madya  
Np. 19680217 198903 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2022 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas untuk mencapai tujuan “*Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKSOSBUD)*” dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu :

1. Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dalam merealisasikan sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menggunakan dana sebesar Rp. 19.561.456.556,- atau 92.98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.039.339.772,- yang bersumber dari DPA Perubahan Nomor: DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 22 November 2022.

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iv
Daftar isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Cascading Kinerja .....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
1.3. Isu-Isu Strategis.....	8
1.4. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana .....	8
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Rencana Strategis .....	13
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	15
2.3. Struktur Program dan Kegiatan.....	16
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>35</b>
3.1. Capaian Kinerja .....	35
3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Realisasi Anggaran.....	55
<b>BAB. IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1. Kesimpulan Umum .....	54
4.2. Saran .....	54
<b>Lampiran :</b>	
- Perjanjian Kinerja	
- Dokumentasi Kegiatan	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Cascading Kinerja**

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. diwajibkan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi setiap akhir tahun anggaran. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan pada suatu perencanaan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Dokumen LKJIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2020 dan Perjanjian Kinerja 2021.

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas dokumen Perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran.

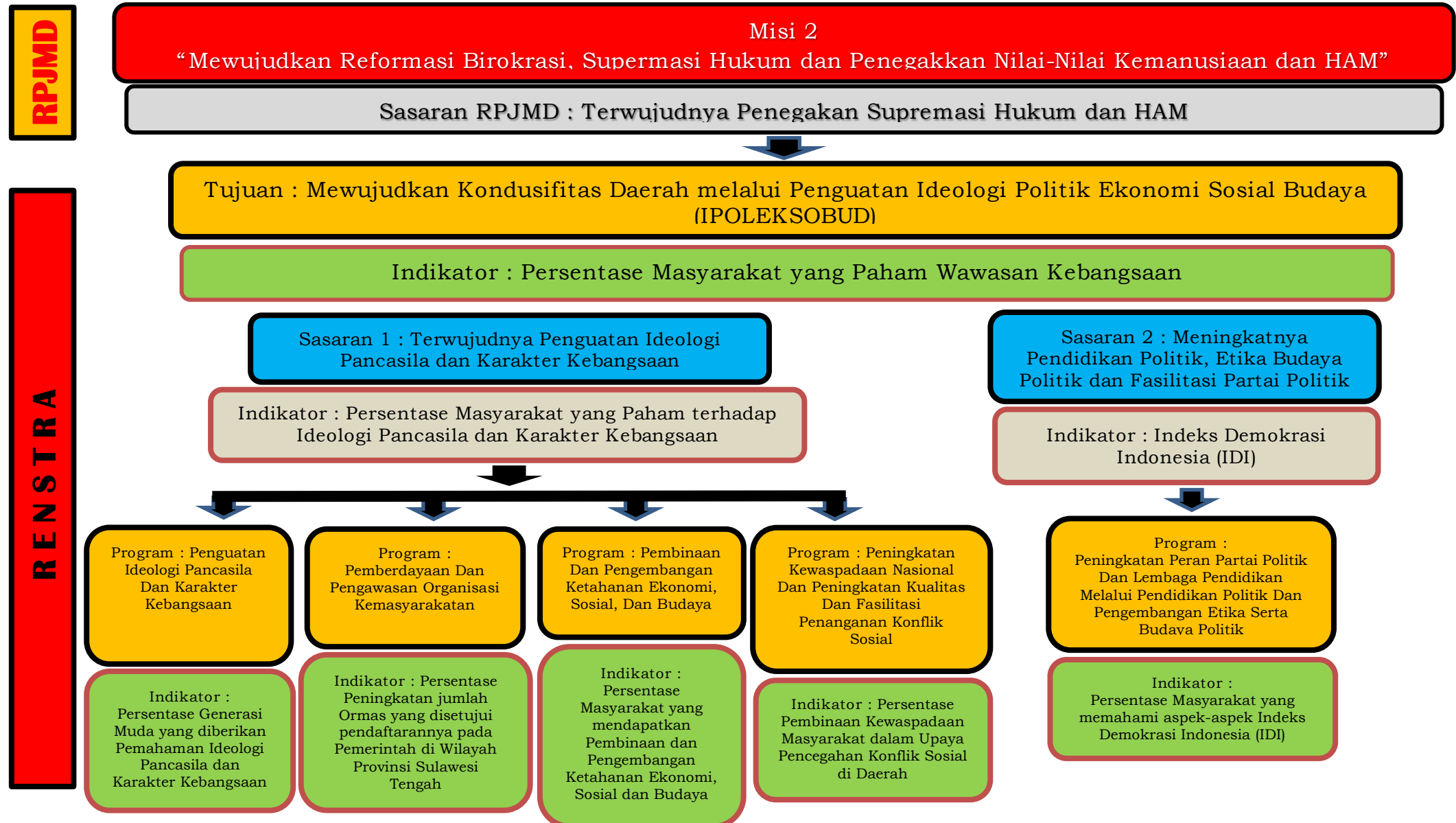
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk pertanggungwabaan dari evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan sesuatu sistem yang diatur

secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Kesbangpol) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja OPD dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesbangpol pada tahun berikutnya.

Dalam penentuan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, disusun Cascading (pohon kinerja) yang merupakan sebuah proses penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, serta tujuan dan sasaran pembangunan kedalam Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah dengan menggunakan kerangka logis sehingga menjadi lebih rinci dan terbagi habis. Dengan kata lain adanya Cascading tersebut, tumpang tindih tugas dan kewenangan pada setiap jenjang jabatan dapat dihindari. Adapun Cascading Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah disajikan pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1.1**  
**Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**



## Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah;
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Ketahanan Ekonomi dan Politik Dalam Negeri lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pelaksanaan Kesekretariatan Badan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa kewenangan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi tersebut di atas adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Politik;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Seni. Budaya. Agama dan Masyarakat;
- e. Penyiapan bahan Evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- f. Memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program. Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas. Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan program/kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah telah mengembangkan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat (Ormas). Organisasi Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

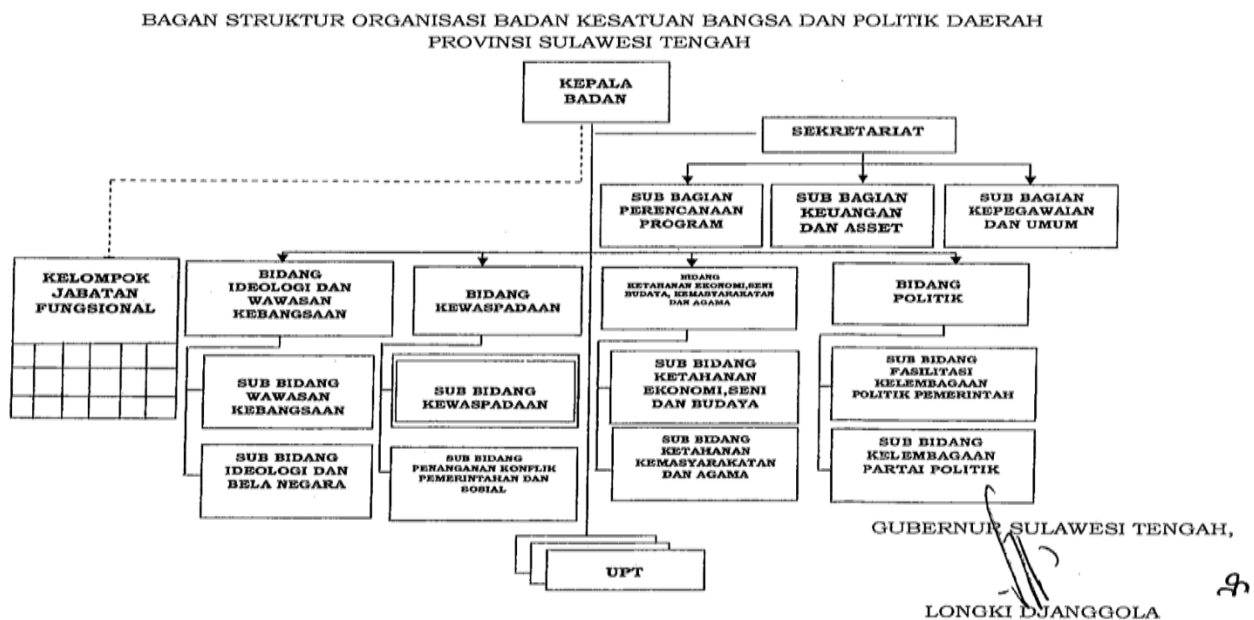
Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap OPD dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian dan 4 (empat) Bidang yang membawahi 8 (delapan) Sub. Bidang

dengan susunan organisasi sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Badan sesuai dengan lampiran VII Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris. membawahi :
  - a. Sub. Bagian Perencanaan Program;
  - b. Sub. Bagian Keuangan dan Asset; dan
  - c. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. membawahi:
  - a. Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Sub. Bidang Ideologi dan Bela Negara.
4. Bidang Kewaspadaan membawahi :
  - a. Sub. Bidang Kewaspadaan; dan
  - b. Sub. Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial.
5. Bidang Politik. membawahi :
  - a. Sub. Bidang Kelembagaan Partai Politik;
  - b. Sub. Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan.
6. Bidang Ketahanan Ekonomi. Seni. Budaya. Agama dan Masyarakat. membawahi :
  - a. Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi. Seni dan Budaya;
  - b. Sub. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Agama.

Secara lengkap terlihat sebagaimana struktur pada Gambar 2.1 :



## **Gambar 1.2** **Struktur Organisasi**

### **1.3 Isu – Isu Strategis**

Secara umum pelaksanaan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan telah dapat berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari target pelaksanaan kegiatan. Namun ada beberapa kendala/permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

1. Masih rendahnya Implementasi Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKSOSBUD) di lingkungan Masyarakat;
2. Kondisi objektif alamiah dan wilayah Sulawesi Tengah dengan kemajemukan suku, etnis, agama, budaya serta kondisi geografis dengan kandungan kekayaan alamnya yang tidak merata;
3. Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis serta masih terdapatnya kecenderungan untuk melakukan berbagai bentuk rekayasa politik;
4. Kebijakan pembangunan ekonomi yang belum mampu menciptakan pemerataan antar daerah;
5. Lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme;
6. Lunturnya pemahaman dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada masyarakat.

### **1.4 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana**

#### **1.4.1 Sumber Daya Manusia**

##### 1) Jumlah dan status Kepegawaian

Jumlah Pegawai dan status Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah sampai Bulan Desember 2021 sebanyak 107 orang, Jumlah tersebut terdiri dari 52 orang Pegawai Negeri Sipil, 55 orang Tenaga kontrak. Dari 107 orang pegawai tersebut, sebanyak 69 orang laki-laki dan 38 orang perempuan.

##### 2) Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 53 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 1 orang Pegawai berpendidikan strata 3 (Doktor), 12 orang berpendidikan strata (pasca sarjana), 24 orang berpendidikan strata 1 (sarjana), 2 orang berpendidikan Diploma III, 12 orang berpendidikan SLTA, 2 orang berpendidikan SLTP, dan tidak ada Pegawai berpendidikan SD.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Pendidikan**  
(Data Bulan Desember 2021) :

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 3	1
Strata 2	12
Strata 1	24
Diploma 3	2
SLTA	11
SLTP	2
SD	-
<b>Total</b>	<b>52</b>

3) Golongan Kepegawaian

Sedangkan berdasarkan Gol. Kepegawaian, dari 53 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Gol. I : 2 orang, Gol. II : 12 orang, Gol. III : 25 orang, Gol. IV : 13 orang.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kepangkatan**  
(Data Bulan Desember 2021) :

Pangkat/golongan	Jumlah
Golongan I	2
Golongan II	12
Golongan III	25
Golongan IV	13
<b>Total</b>	<b>52</b>

## 4) Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari

**Tabel 1.3**  
**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA**  
(Data Bulan Desember 2021) :

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
	<b>Bangunan</b>	
1	Bangunan Gedung Kantor	1 Gedung
	<b>Alat-alat Angkutan</b>	<b>31 Unit</b>
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6 Unit
2	Pick Up	1 unit
3	Sepeda Motor	24 unit
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>419 Buah</b>
1	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1 buah
2	Lemari Besi	10 buah
3	Filling Besi/Metal	2 buah
4	Brand Kas	3 buah
5	Lemari kayu	3 buah
6	Mesin Absensi	1 buah
7	Alat Kantor Lainnya	1 buah
8	Kursi Besi/Metal	21 buah
9	Meja Rapat	17 buah
10	Kursi Rapat	25 buah
11	Kursi Tamu	4 buah
12	Meja Komputer	2 buah
13	Tenda	2 buah
14	Meja Biro	38 buah
15	Sofa	1 buah
16	Kursi Kerja	28 buah
17	Gordyn	60 buah
18	Karpet	2 buah
19	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1 buah
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>419 Buah</b>
1	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1 buah
2	Lemari Besi	10 buah
3	Filling Besi/Metal	2 buah
4	Brand Kas	3 buah
5	Lemari kayu	3 buah
6	Mesin Absensi	1 buah
7	Alat Kantor Lainnya	1 buah
8	Kursi Besi/Metal	21 buah
9	Meja Rapat	17 buah

No	Jenis Barang	Jumlah
10	Kursi Rapat	25 buah
11	Kursi Tamu	4 buah
12	Meja Komputer	2 buah
13	Tenda	2 buah
14	Meja Biro	38 buah
15	Sofa	1 buah
16	Kursi Kerja	28 buah
17	Gordyn	60 buah
18	Karpet	2 buah
19	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1 buah
20	Lemari Es	1 buah
21	AC Split	20 buah
22	Dispenser	13 buah
23	Televisi	6 buah
24	Loudspeaker	2 Buah
25	Sound System	1 Buah
26	Dispenser	1 Buah
27	Handy Cam	1 Buah
28	Tripot Speaker	2 buah
29	P.C Unit/ Komputer PC	22 buah
30	Laptop	10 buah
31	Note Book	17 buah
32	Printer	13 buah
33	Scanner	6 buah
34	Harddisk Internal	1 buah
35	Harddisk Eksternal	1 Buah
36	Speaker Aktive Komputer	2 Buah
37	Power Supply	2 Buah
38	Wireless Lan (USB)	1 Buah
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 Buah
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7 Buah
42	Meja Operator	3 Buah
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11 Buah
46	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10 Buah
47	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	1 Buah
48	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1 Buah
49	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3 Buah
	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	<b>46 Buah</b>
1	Proyektor + Attachment	1 Buah
2	Equalizer	1 Buah
3	Microphone/Wireless Mic	1 Buah
4	Microphone Table stand	2 Buah
5	Camera Electronic	3 Buah
6	Camera Film	1 Buah
7	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1 Buah
8	Facsimile	2 Buah



No	Jenis Barang	Jumlah
9	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	9 Buah
10	Alat Pemancar VHF/FM Lain- lain	1 Buah
11	Antena VHF/FM Portable	2 Buah
12	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	22 Buah
	<b>Alat Laboratorium</b>	<b>4 Buah</b>
1	Exhaust Fan	3 Buah
2	Kabel Listrik	1 Buah

## 1.5 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021

### 1.5.1 Uraian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

- 1) Informasi dalam Laporan Kinerja berdampak pada perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan Program secara terukur.
- 2) Evaluasi program harus dilakukan dengan menginformasikan capaian hasil program, keberhasilan/ketidakberhasilan program dan memuat simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan suatu program.
- 3) Hasil Evaluasi disampaikan dan dilomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan penerapan manajemen kinerja

### 1.5.2 Tindaklanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun 2021

- 1) Membuat Kesimpulan dan Rekomendasi hasil laporan kinerja (LKJIP) dalam pengelolaan program/kegiatan
- 2) Membuat Evaluasi Anggaran dan Kinerja dan dibuat kesimpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan
- 3) Hasil Evaluasi dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui rapat-rapat atau surat-surat edaran dan ditindaklanjuti.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan ketentuan dan kaidah perencanaan pembangunan daerah, bahwa yang mempunyai VISI dan MISI adalah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam proses politik, dimana sebagai salah satu kontestan pilkada mengusung VISI dan MISI, tentunya setelah kandidat memenangkan kontestasi tersebut, mempunyai kewajiban untuk menunaikannya yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sebagai mesin birokrasi dalam mewujudkan VISI dan MISI tersebut.

Karena VISI dan MISI merupakan ranah dari pimpinan kepala daerah, maka organisasi perangkat daerah, tidak perlu lagi mengusung visi dan misi, tetapi harus dapat membantu Kepala Daerah mewujudkan visi dan misi tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang sekaligus merupakan mandat/tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

#### **Pernyataan Visi**

Visi Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan gambaran dari masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2021 – 2026, yaitu **“Gerak Cepat Menuju**

***Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju***” yang dapat diartikan melakukan perubahan-perubahan cepat dengan mempertimbangkan kemampuan mengantisipasi perubahan lingkungan Internasional, Nasional dan Daerah. Untuk itu Fokus Sentral Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah : Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Perampingan-Pengabungan OPD sesuai Tugas dan Fungsi dan Penggunaan Teknologi Informasi serta Big Data dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan.

### **Pernyataan Misi**

Misi dari Provinsi Sulawesi Tengah yang di ambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Misi ke 2, yaitu ***“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”***

#### **2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Badan Kesbangpol untuk mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan strategis Badan Kesbangpol adalah ***“Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Sosial Budaya (IPOLEKSOSBUD)”***

#### **2.1.2 Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami review pada tahun 2022, dan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 mempunyai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik

### 2.1.3 Indikator Kinerja

Indikator Sas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Indeks Demokrasi Indonesai (IDI)

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa Program, yaitu berupa kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi;
3. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;

5. Peningkatan Kewaspadaan Dini dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (Program dan Kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai berikut :

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan
3. Pembinaan Ketahanan Nasional
4. Penanganan Konflik Sosial sesuai peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas
6. Pembinaan Kerukunan umat beragama
7. Memfasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
8. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

### **2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022**

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sesuai dengan perubahan nomenkatur Permendagri 90 Tahun 2019. terdapat 6 (enam) Program. sebagaimana berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.  
Dengan kegiatan dan output atau indikator Kegiatan sebagai berikut  
:  
a. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase Realisasi Anggaran.
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa.
  - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.  
Dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Indikator kinerja program atau outcome adalah Peningkatan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan. dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya.

Dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial  
Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Daerah.  
Dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  
Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.



**Tabel 2.1**  
**Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2022**

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp
1	2	3					4	5		6	
							<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>21.039.339.772</b>
	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas</b>	<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah PROVINSI</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>64,50</b>	<b>9.221.995.122</b>
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>73</b>	<b>184.450.875</b>
		8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	8.590.650
		8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	5.128.575
		8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-
		8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	3.478.575
		8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	-
		8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	20.976.750

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp
1	2	3					4	5		6	
		8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	146.276.325
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Persentase</b>	<b>97,50</b>	<b>7.470.787.851</b>
		8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	1	6.239.985.376
		8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1.165.896.000
		8	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-
		8	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	-
		8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	54.548.000
		8	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	-
		8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	7.164.900
		8	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	3.193.575

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp
1	2	3					4	5		6	
		8	01	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>2</b>	<b>74.788.150</b>
		8	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-
		8	01	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	-
		8	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	56.444.575
		8	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	18.343.575
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Indeks</b>	<b>80</b>	<b>32.729.500</b>
		8	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-
		8	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-
		8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-
		8	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	32.729.500
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>398.713.988</b>
		8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	6.799.038
		8	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	17.258.500

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp
1	2	3					4	5		6	
		8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	1	60.280.950
		8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan	1	19.320.000
		8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	24.500.000
		8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	270.555.500
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>463.692.933</b>
		8	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-
		8	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	35.750.000
		8	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-
		8	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	227.942.933
		8	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	200.000.000
		8	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>2</b>	<b>228.651.825</b>

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp
1	2	3					4	5		6	
		8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket	-	-
		8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	92.062.000
		8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-
		8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	136.589.825
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>368.180.000</b>
		8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	-
		8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	319.600.000
		8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	40	27.580.000
	-	8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	21.000.000
	-	8	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-

No	Sasaran	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		
							5	6	K	Rp	
1	2	3				4	Indikator	Satuan	K	Rp	
	<b>Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	8	01	02		<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	%	20	508.294.575	
		8	01	02	1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Dokumen	5	508.294.575	
		8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Laporan	1	3.365.500
		8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Laporan	1	6.376.000
		8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100	174.043.525
		8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150	136.013.050

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp
1	2	3					4	5		6	
		8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	188.496.500
		8	01	02	1.01	06	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	-	
		8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Ormas/Anggota Ormas di Sulawesi Tengah yang mendapat Pemberdayaan dan Sosialisasi Keormasan</b>	%	20	7.767.082.500
		8	01	04	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Dokumen</b>	5	7.767.082.500
		8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Laporan	1	3.324.000
		8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Laporan	1	3.010.500

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp
1	2	3					4	5		6	
		8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	60	7.330.749.900
		8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	60	237.301.375
		8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4	192.696.725
		8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	%	20	338.480.725
		8	01	05	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Dokumen	5	338.480.725
		8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Laporan	1	2.892.800



No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp
1	2	3					4	5		6	
		8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Laporan	1	3.038.000
		8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	60	72.583.950
		8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	60	63.575.875
		8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	196.390.100
		8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN</b>	<b>Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah</b>	%	20	581.604.925

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								5	6	K	Rp
1	2	3					4	Indikator	Satuan	K	Rp
							<b>FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>				
		8	01	06	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>581.604.925</b>
		8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	4.533.900
		8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Laporan	4	22.333.700
		8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	130	106.393.725
		8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang	Orang	150	144.859.975

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								5	6	K	Rp
1	2	3					4	Indikator	Satuan	K	Rp
							Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
		8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4	194.615.450
		8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Laporan	4	108.868.175
	<b>Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik</b>	8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)</b>	%	20	2.621.881.925
		8	01	03	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)</b>		5	2.621.881.925

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								5	6	K	Rp
1	2	3					4	Indikator	Satuan	K	Rp
							<b>Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>				
		8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Laporan	1	3.049.000
		8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Laporan	1	5.549.000
		8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Orang	40	1.855.205.450
		8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Orang	120	308.467.750

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
								5	6	K	Rp
1	2	3					4	Indikator	Satuan	K	Rp
							Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
		8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4	449.610.725

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Indikator Kinerja Utama Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kestuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada lampiran Tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Matriks Indikator Utama Badan Kesbangpol Prov. Sulteng**  
**Tahun 2021-2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)	Terwujudnya Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)	Persentase Masyarakat yang Paham Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi berdasar Pancasila	20	40	60	80	100
2.		Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20	40	60	80	100
		Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,50	76,80	77,10	77,15	77,20

## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Berikut Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 dengan sasaran:

1. Merwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

2. Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik.

**Tabel 2.2**  
**Matriks Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20 %
2.	Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,50

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022.

**Tabel 2.3**  
**Matriks Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Formulasi / Rumus Perhitungan
1.	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2022	Jumlah 20% Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Kegiatan Badan Kesbangpol dikali target 3.850 Masyarakat dalam 5 Tahun
2.	Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2022	Jumlah Aspek dibagi Jumlah Total Aspek

Sumber : IKU Badan Kesbangpol Tahun 2022

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 21,039,339,772.- yang selengkapny sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2022.

### 3.1 Capaian Kinerja

#### a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing masing indikator kinerja sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2022 akan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20 %	29,74 %	148,70 %
2.	Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,50		

Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20 %	29,74 %	148,70 %



Untuk mencapai Sasaran Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Badan Kesbangpol mempunyai indikator Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target 20% (770 orang Masyarakat) dan capaian realisasi 29,74% (1.145 orang Masyarakat) dengan formulasi perhitungan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kegiatan Badan Kesbangpol pada tahun n dibagi dengan jumlah target 3.850 orang Masyarakat dalam 5 tahun dikali seratus. Untuk Tahun 2022 capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut secara keseluruhan melebihi target yg di tetapkan.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa;
2. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan;
3. Kegiatan Outbond Wawasan Kebangsaan;
4. Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan Organisasi Kemasyarakatan;
6. Kegiatan Bimtek Aplikasi Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas;
7. Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
8. Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya;
9. Kegiatan Sosialisasi P4GN dan PN;
10. Kegiatan Rencana Aksi Daerah;
11. Kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
12. Kegiatan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah;
13. Kegiatan Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan Konflik di Daerah;
14. Kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Paham Radikal;
15. Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan di Wilayah Perbatasan antar Negara, Provinsi, Kab/Kota.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,50		

Untuk mencapai Sasaran Meningkatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik mempunyai indicator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan target 76,50 dan capaian realisasi (akan dikeluarkan BPS) dengan formulasi perhitungan Jumlah Aspek dibagi Jumlah Total Aspek capaian kinerja dari indicator kinerja (dikeluarkan BPS).

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia;
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Kegiatan Forum Komunikasi Politik;

Dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam system politik yang sedang diterapkan dan setiap individu tidak hanya sekedar mengetahui tapi juga dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik, serta untuk membangun etika dan moral politik dengan sikap dewasa dalam berdemokrasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilukada.

**Tabel 3.4**  
**Matriks Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun 2022**

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8				
		8					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>								
		8	01				<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				21.039.339.772		19.561.456.556		92,98
	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas</b>	8	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>64,50</b>	<b>9.221.995.122</b>		<b>8.145.647.056</b>		<b>88,33</b>
		8	01	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>73</b>	<b>184.450.875</b>		<b>179.169.195</b>	-	<b>97,14</b>
		8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	8.590.650	3	8.167.275	100,00	95,07
		8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.128.575	1	5.056.595	100,00	98,60
		8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.478.575	1	3.478.575	100,00	100,00
		8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	20.976.750	1	20.597.425	100,00	98,19
		8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	146.276.325	1	141.869.325	100,00	96,99

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		8	01	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Persentase</b>	<b>97,50</b>	<b>7.470.787.851</b>	<b>85,88</b>	<b>6.416.150.215</b>	<b>88,09</b>	<b>85,88</b>
		8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	1	6.239.985.376	1	5.185.691.160	100,00	83,10
		8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1.165.896.000	1	1.165.896.000	100,00	100,00
		8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	54.548.000	1	54.337.242	100,00	99,61
		8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	7.164.900	2	7.046.388	100,00	98,35
		8	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	3.193.575	1	3.179.425	100,00	99,56
		8	01	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>2</b>	<b>74.788.150</b>	<b>2</b>	<b>72.228.178</b>	<b>100,00</b>	<b>96,58</b>
		8	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	56.444.575	1	53.956.583	100,00	95,59
		8	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	18.343.575	1	18.271.595	100,00	99,61

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								5		6		7		8	
		8	01	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Indeks</b>	<b>80</b>	<b>32.729.500</b>	-	<b>32.729.500</b>	-	<b>100,00</b>
		8	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	1	32.729.500	1	32.729.500	100,00	100,00
		8	01	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>398.713.988</b>	<b>6</b>	<b>394.407.607</b>	<b>100,00</b>	<b>98,92</b>
		8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	6.799.038	1	6.788.543	100,00	99,85
		8	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	17.258.500	1	17.071.207	100,00	98,91
		8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	60.280.950	1	60.251.613	100,00	99,95
		8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Laporan	1	19.320.000	1	17.850.000	100,00	92,39
		8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	Laporan	1	24.500.000	1	24.500.000	100,00	100,00
		8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	270.555.500	1	267.946.244	100,00	99,04
		8	01	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1,00</b>	<b>463.692.933</b>	<b>2</b>	<b>457.280.310</b>	<b>200,00</b>	<b>98,62</b>

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								5		6		7		8	
		8	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	35.750.000	1	34.600.000	#DIV/0!	96,78
		8	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	227.942.933	36	225.936.695	720,00	99,12
		8	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	200.000.000	1	196.743.615	#DIV/0!	98,37
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>2</b>	<b>228.651.825</b>	<b>2</b>	<b>225.770.047</b>	<b>100,00</b>	<b>98,74</b>
		8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	92.062.000	1	89.351.060	100,00	97,06
		8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	136.589.825	1	136.418.987	100,00	99,87
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>368.180.000</b>	<b>3</b>	<b>367.912.004</b>	<b>100,00</b>	<b>99,93</b>
		8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	319.600.000	33	319.587.004	100,00	100,00
		8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	40	27.580.000	40	27.400.000	100,00	99,35

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		
	-	8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	21.000.000	1	20.925.000	100,00	99,64
	<b>Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	8	01				<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	%	20	508.294.575	28,00	497.167.280	140,00	97,81
		8	01	02	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Dokumen	5	508.294.575	5	497.167.280	100,00	97,81
		8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Laporan	1	3.365.500	1	3.093.460	100,00	91,92
		8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Laporan	1	6.376.000	1	6.375.985	100,00	100,00
		8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Orang	100	174.043.525	230	173.465.578	230,00	99,67

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								5		6		7		8	
						Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150	136.013.050	120	134.093.727	80,00	98,59
		8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	188.496.500	4	180.138.530	100,00	95,57
	<b>Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik</b>	8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)</b>	%	20	2.621.881.925	36,88	2.599.695.916	184,38	99,15
		8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks	Dokumen	5	2.621.881.925	5	2.599.695.916	100,00	99,15



No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								5		6		7		8	
						<b>Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Demokrasi Indonesia (IDI)</b>								
		8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Laporan	1	3.049.000	1	3.024.291	100,00	99,19
		8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Laporan	1	5.549.000	1	5.548.999	100,00	100,00
		8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Orang	40	1.855.205.450	125	1.854.467.809	312,50	99,96

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		
							Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun							
		8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	120	308.467.750	170	304.843.702	141,67	98,83
		8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Laporan	4	449.610.725	4	431.811.115	100,00	96,04

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															5
							Situasi Politik di Daerah								
	<b>Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>8</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Ormas/Anggota Ormas di Sulawesi Tengah yang mendapat Pemberdayaan dan Sosialisasi Keormasan</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>7.767.082.500</b>	<b>46,67</b>	<b>7.416.313.072</b>	<b>233,33</b>	<b>95,48</b>
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>1.01</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>7.767.082.500</b>	<b>5</b>	<b>7.416.313.072</b>	<b>100,00</b>	<b>95,48</b>
		8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Laporan	1	3.324.000	1	3.095.213	100,00	93,12
		8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Laporan	1	3.010.500	1	2.777.180	100,00	92,25
		8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	60	7.330.749.900	75	7.016.330.725	125,00	95,71

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		
		8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	60	237.301.375	205	225.770.892	341,67	95,14
		8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4	192.696.725	4	168.339.062	100,00	87,36
	<b>Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Masyarakat yang memahami aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	%	20	338.480.725	30	336.977.064	150,00	99,56
		8	01	05	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Dokumen	5	338.480.725	5	336.977.064	100,00	99,56
		8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Laporan	1	2.892.800	1	2.638.680	100,00	91,22

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								5		6		7		8	
							di Daerah yang Disusun								
		8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Laporan	1	3.038.000	1	2.804.280	100,00	92,31
		8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	60	72.583.950	120	72.530.600	200,00	99,93
		8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	60	63.575.875	60	62.706.629	100,00	98,63
		8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Laporan	4	196.390.100	4	196.296.875	100,00	99,95

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		
							Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
	<b>Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>8</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>581.604.925</b>	<b>24</b>	<b>565.656.168</b>	<b>119,64</b>	<b>97,26</b>
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>1.01</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>581.604.925</b>	<b>5</b>	<b>565.656.168</b>	<b>100,00</b>	<b>97,26</b>
		<b>8</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>1.01</b>	<b>01</b>	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>4.533.900</b>	<b>1</b>	<b>4.403.852</b>	<b>100,00</b>	<b>97,13</b>

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8			
		8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Laporan	4	22.333.700	4	22.197.379	100,00	99,39
		8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	130	106.393.725	135	103.283.809	103,85	97,08
		8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Orang	150	144.859.975	200	140.758.829	133,33	97,17

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5		6		7		8	
								Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
		8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4	194.615.450	4	186.349.809	100,00	95,75
		8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Laporan	4	108.868.175	4	108.662.490	100,00	99,81
<b>Jumlah</b>											<b>21.039.339.772</b>		<b>19.561.456.556</b>		



**b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya**

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

**Tabel 3.5**  
**Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN INDIKATOR	TARGET				CAPAIAN				KET
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
<b>IKU 2016 - 2021</b>												
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial.	Menurunnya Jumlah Konflik/Kasus yang terjadi di Masyarakat	Konflik	3	2	1	-	2	2	1	-	
2	Meningkatnya Demokrasi yang sehat dan Partisipasi Politik masyarakat di Sulawesi Tengah	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah	Indeks	76%	76%	76%	-	75,29	77,27	-	-	
3	Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan pendahuluan Bela Negara.	Orang	1.000	1.000	1.100	-	1000	75	140	-	
4	Menurunnya Kasus/Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.	Orang	275	325	350	-	275	50	100	-	
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Nilai-Nilai Seni	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-	Orang	335	330	330	-	345	150	45	-	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN INDIKATOR	TARGET				CAPAIAN				KET
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Nilai Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.										
<b>IKU 2022 - 2026 Perubahan Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019</b>												
1	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	-	-	-	20% (770 Orang)		-	-	30,97 % (1.445 Orang)	Target 3.850 Masyarakat dalam 5 Tahun yang mengikuti Sosialisasi Kegiatan Badan Kesbangpol
2	Meningkatnya Pendidikan, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks				76,50		75,85	78,51	-	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2022 Belum di Keluarkan dari BPS

**c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target 2026
1.	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	29,74 %	100 %
2.	Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	(Belum dikeluarkan BPS)	77,20

**d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan**

Hasil analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 pada pelaksanaan rencana strategik mencakup 2 (Dua) sasaran strategik dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa Program/Kegiatan yang ada dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022.

### **3.2 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran**

**a. Efisiensi Sumber Daya**

Hasil analisis dalam penggunaan sumber daya Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 pada pelaksanaan rencana strategik mencakup 2 (Dua) sasaran strategik dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan dari semua indikator yang ada, walaupun sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor yang belum memadai, namun demikian dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga pelaksanaan rencana strategik mencakup 2 (Dua) sasaran strategik dapat dilaksanakan.

## b. Realisasi Anggaran

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis yang telah diuraikan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran APBD murni Tahun 2022 sebesar Rp. 18.439.339.772,- dan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 21,039,339,772.- sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Operasi	: Rp. 20.775.646.839,-
- Belanja Pegawai	: Rp. 6.326.865.376,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 5.471.688.263,-
- Belanja Hibah	: Rp. 8.977.093.200,-
2) Belanja Modal	: Rp. 263.692.933,-
<b>Total Jumlah Pagu</b>	<b>: Rp 21.039.339.772,-</b>

Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi	: Rp. 19.300.919.861,- (92,90 %)
- Belanja Pegawai	: Rp. 5.272.571.160,- (83,34 %)
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 5.351.255.501,- (97,80 %)
- Belanja Hibah	: Rp. 8.677.093.200,- (96,66 %)
2) Belanja Modal	: Rp. 260.536.695,- (98,80 %)
<b>Total Realisasi</b>	<b>: Rp 19.561.456.556,- (92,98 %)</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan Umum**

Secara Umum dapat di simpulkan bahwa dari 2 (Dua) sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di tetapkan dalam penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, relisasinya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis “Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan”, dengan indikator sasaran Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan menunjukkan pencapaian yang baik dengan tingkat pencapaian 148,70%.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik”, dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia belum dapat terukur, dikarenakan dikeluarkan oleh BPS, Badan Kesbangpol sebagai salah satu penunjang dalam mencapai target yang ditetapkan.
3. Dalam Realisasi Anggaran Tahun 2020, proses perencanaan penyusunan dan pelaporan anggaran mengalami peningkatan, sehingga realisasi keuangan atau penyerapan menjadi lebih baik.

### **4.2 Saran**

Langkah kedepan sehubungan dengan proses penyusunan LKJiP adalah:

1. Sistem AKIP pada Badan Kesbangpol belum terbangun secara optimal dikarenakan mekanisme pelaporan dari para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), tidak memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga penyusunan LKJiP Badan Kesbangpol belum dapat tersajikan dengan optimal dikarenakan sulitnya mencari data yang dihasilkan dari masing – masing bidang teknis pada Badan Kesbangpol dimana data tersebut tidak diperbaharui secara terperinci dan jelas.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun-tahun mendatang Badan Kesbangpol akan menyempurnakan sistem AKIP, sehingga LKJiP yang disajikan akan lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang diharapkan masyarakat.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. RUSDY MASTURA**  
Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di disebut pihak kedua

Dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu <sup>25</sup> Februari 2022

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**  
**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**  
  
**H. RUSDY MASTURA**

**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19680217 198903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

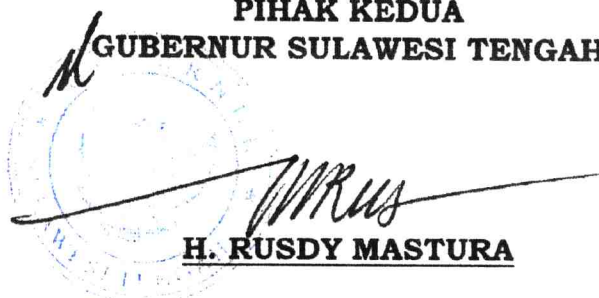
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	2	3	5
1.	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20 %
2.	Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,50

**PROGRAM TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 459.399.900,-	
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 2.671.866.600,-	Terdapat Dana Bantuan Keuangan Parpol
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 5.720.085.575,-	Terdapat Dana Hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 338.013.975,-	
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 531.997.375,-	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 9.721.363.425,-</b>	


Palu, 25 Februari 2022

**PIHAK KEDUA  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**



**H. RUSDY MASTURA**

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19680217 198903 1 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BAGIAN SEKRETARIAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2022

**PIHAK KEDUA**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG

**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Madya

Nip 19680217 198903 1 004

**PIHAK PERTAMA**

**I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**

Pembina Tkt I

Nip 19760819 199412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BAGIAN SEKRETARIAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64.50 (Indeks)

**PROGRAM BAGIAN SEKRETARIAT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.717.976.347	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG

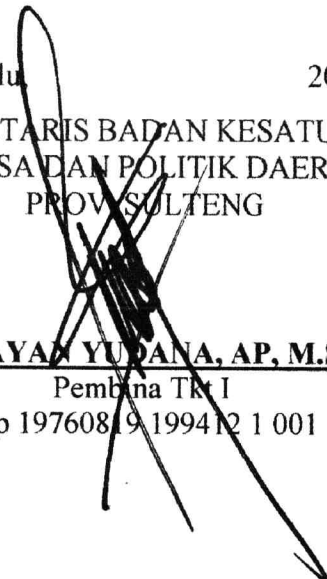


**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip 19680217 198903 1 004

Palu 2022

SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG

**IWAYAN YUDANA, AP, M.Si**  
Pembina Tkt I  
Nip 19760819 199412 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG POLITIK  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

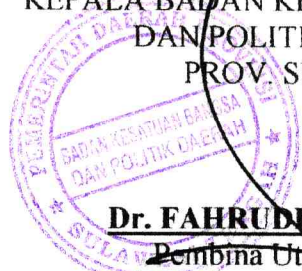
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH -  
PROV. SULTENG**



**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip 19680217 198903 1 004

**PIHAK PERTAMA**

**RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si**  
Pembina Tkt I  
Nip 19710102 199803 1 012

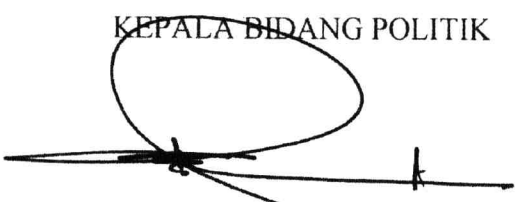
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG POLITIK  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	20 %

**PROGRAM BIDANG POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 2.671.866.600	Terdapat Dana Bantuan Keuangan Parpol

  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG**  
**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 Nip 19680217 198903 1 004

Palu, 2022  
**KEPALA BIDANG POLITIK**  
  
**RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si**  
 Pembina Tkt I  
 Nip 19710102 199803 1 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG

**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip 19680217 198903 1 004

Palu,  
**PIHAK PERTAMA**

**KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos**  
Pembina Tkt I  
Nip 19700526 199303 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20 %

**PROGRAM BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 459.399.900	

Palu, 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG



**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip 19680217 198903 1 004

KEPALA BIDANG WAWASAN  
KEBANGSAAN

*[Handwritten signature of Kristo Suryanto Tumakaka]*

**KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos**  
Pembina Tkt I  
Nip 19700526 199303 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG KEWASPADAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. SURYA, M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

**PIHAK PERTAMA**

**Dra. SURYA, M.Si**  
Pembina Tkt I  
Nip 19650330 198610 2 005

**PIHAK KEDUA**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG



**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip 19680217 198903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG KEWASPADAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah	20 %

**PROGRAM BIDANG KEWASPADAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 531.997.375	

Palu, 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG



**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip 19680217 198903 1 004

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN

**Dra. SURYA, M.Si**  
Pembina Tkt I  
Nip 19650330 198610 2 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI  
BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DARMOLI A. DAEPATOLA, M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan  
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

**PIHAK KEDUA**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG

**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip 19680217 198903 1 004

**PIHAK PERTAMA**

**Drs. DARMOLI A. DAEPATOLA, M.Si**  
Pembina Tkt I  
Nip 19640818 199003 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	100 %
2.	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	20 %

PROGRAM BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI BUDAYA,  
AGAMA DAN KEMASYARAKATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 5.720.085.575	Terdapat Dana Hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 338.013.975	

Palu,

2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG



**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip 19680217 198903 1 004

KEPALA BIDANG KETAHANAN  
EKONOMI, SENI BUDAYA, AGAMA DAN  
KEMASYARAKATAN

**Drs. DARMOLI A. DAEPATOLA, M.Si**  
Pembina Tkt I  
Nip 19640818 199003 1 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SUB. BAG. PERENCANAAN PROGRAM**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMAD RIZAL, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Plh Ka. Sub. Bag. Perencanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2022

**PIHAK KEDUA**

SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG

**I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**

Pembina Tkt I

Nip 197608191994121001

**PIHAK PERTAMA**

**MOHAMAD RIZAL, S.Sos, M.Si**

Penata Tkt I

Nip 197908212006041007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BAG. PERENCANAAN PROGRAM**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73(Nilai SAKIP)
<b>Sasaran Sub Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
5.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 151.083.050	
<b>Sub Kegiatan :</b>			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.879.825	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 4.393.575	

3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 2.743.575	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 18.276.750	
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 120.789.325	

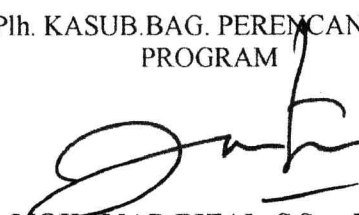
SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG



**I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**  
Penata Tkt I  
Nip 19760819 199412 1 001

Palu, 2022

Plh. KASUB.BAG. PERENCANAAN  
PROGRAM



**MOHAMAD RIZAL, S.Sos, M.Si**  
Penata Tkt I  
Nip 19790821 200604 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SUB. BAG. KEUANGAN DAN ASSET**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si**  
Jabatan : Ka. Sub. Bag. Keuangan dan Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2022

**PIHAK KEDUA**  
SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG  
  
**I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**  
Pembina Tk I  
Nip 19760819 199412 1 001

**PIHAK PERTAMA**  
  
**MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si**  
Pembina  
Nip 19730527 200112 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BAG. KEUANGAN DAN ASSET**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
I	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah selama 1 tahun	Persentase Realisasi Anggaran	97,50 %
<b>Sasaran Sub Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
2.	Tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
3.	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
5.	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
II	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2.	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
III	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit

<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
IV	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit
2.	Tersedianya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit
3.	Tersedianya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>			
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.456.461.671	
<b>Sub Kegiatan :</b>			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.239.985.196	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.147.200.000	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 58.918.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 7.164.900	
5.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 3.193.575	
<b>Kegiatan :</b>			
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 60.276.150	
<b>Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 56.932.575	
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 3.343.575	
<b>Kegiatan :</b>			
III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 100.980.000	
<b>Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 100.980.000	



<b>Kegiatan :</b>			
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 447.825.000	
<b>Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 301.975.000	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 25.350.000	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 120.500.000	


  
 SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
 BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
 PROVINSI SULTENG

**I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**  
 Pembina Tkt I  
 Nip 19760819 199412 1 001

Palu, 2022  
 KASUB.BAG. KEUANGAN DAN ASSET


  
**MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si**  
 Pembina  
 Nip 19730527 200112 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SUB. BAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. SITTI BASNIAH, M.Si**

Jabatan : Ka. Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA**

SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULITENG

**I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**

Pembina Tkt I

Nip 197608191994121001

Palu,

2022

**PIHAK PERTAMA**

**Dra. SITTI BASNIAH, M.Si**

Pembina

Nip 196505051996032002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
I	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (Indeks)
<b>Sasaran Sub Kegiatan :</b>			
1.	Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 org
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
II	Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
4.	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
5.	Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
6.	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
III	Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Laporan
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
3.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

## KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>			
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 32.789.750	
<b>Sub Kegiatan :</b>			
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Rp. 32.789.750	
<b>Kegiatan :</b>			
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 237.708.901	
<b>Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.012.401	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 14.758.500	
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 60.047.750	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 29.820.000	
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 19.350.000	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 106.720.250	
<b>Kegiatan :</b>			
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 230.851.825	
<b>Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 77.062.000	
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 21.820.000	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 131.969.825	

SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROV. SULTENG

**IWAYAN YADANA, AP, M.Si**

Pembina Tkt I

Nip 19760819 199412 1 001

Palu,

2022

KASUB.BAG. KEPEGAWAIAN  
DAN UMUM

**Dra. SITTI BASNIAH, M.Si**

Pembina

Nip 19650505 199603 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
SUB. BID. FASILITASI KELEMBAGAAN POLITIK PEMERINTAHAN**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUH HUSNI PETTAWALI, S.STP., MAP**

Jabatan : Ka. Sub. Bid. Fasilitasi kelembagaan politik pemerintahan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :  
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2022

**PIHAK KEDUA**

KEPALA BIDANG POLITIK

**RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si**

Pembina Tkt I

Nip 197101021998 03 1 012

**PIHAK PERTAMA**

**MUH HUSNI PETTAWALI, S.STP., MAP**

Pembina

Nip 19840501 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SUB. BID. FASILITASI KELEMBAGAAN POLITIK PEMERINTAHAN**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
1		Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	5 Dokumen
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 orang
3.	Terlaksananya Laporan, Monitoring Evaluasi di Bidang Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB. BID. FASILITASI KELEMBAGAAN POLITIK  
PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>		
I	Rp. 2.671.866.600	
<b>Sub Kegiatan :</b>		
1.	Rp. 3.049.000	
2.	Rp. 243.816.000	
3.	Rp. 216.229.600	

Palu, 2022

KEPALA BIDANG POLITIK



**RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si**  
Pembina Tkt I  
Nip 197101021998 03 1 012

KASUB. BID. FASILITASI  
KELEMBAGAAN POLITIK  
PEMERINTAHAN



**MUH HUSNI PETTAWALI, S.STP., MAP**  
Pembina  
Nip 19840501 200212 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
SUB. BID. KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURMILA B. TACAALI, SH**

Jabatan : Plh. Ka. Sub. Bid. Kelembagaan Partai Politik  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2022

**PIHAK KEDUA**


KEPALA BIDANG POLITIK

  
**RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si**

Pembina Tkt I

Nip 197101021998 03 1 012

**PIHAK PERTAMA**



**NURMILA B. TACAALI, SH**

Penata Tkt I

Nip 19640906 198603 2 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUB. BID. KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
I		Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	5 Dokumen
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya kebijakan di Bidang Pendidikan Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya kebijakan di Bidang Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 orang

**KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB. BID. KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>			
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 2.671.866.600	

Sub Kegiatan :		
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 5.549.000
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 2.203.223.000

Palu,

2022

KEPALA BIDANG POLITIK

**RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si**

Pembina Tkt I

Nip 197101021998 03 1 012

Pih. KASUB.BID.  
KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK

**NURMILA B. TACAALI, SH**

Penata Tkt I

Nip 19640906 198603 2 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SIANE FRANSIEN TAGA, S.Sos**

Jabatan : Plh. Ka. Sub. Bid. Ideologi dan Bela Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2022

**PIHAK KEDUA**

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN  
WAWASAN KEBANGSAAN

**KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos**  
Pembina Tkt I

Nip 19700526 199303 1 004

**PIHAK PERTAMA**

**SIANE FRANSIEN TAGA, S.Sos**  
Penata Tkt I

Nip 19690615 200701 2 051

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN  
KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
1	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5 Dokumen
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Bela Negara, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi, Bela Negara, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen
3.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang
4.	Terlaksananya Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila, Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan Ketahanan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang
5.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta tersedianya Laporan Situasi dan Kondisi daerah tentang di Ideologi, Bela Negara, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan

## KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUBBID. IDEOLOGI DAN BELA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>			
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 459.399.900	
<b>Sub Kegiatan :</b>			
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 3.365.500	
2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 6.376.000	
3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 128.543.725	
4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 136.013.050	
5.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 185.101.625	

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN  
WAWASAN KEBANGSAAN

Palu, 2022

KASUB.BID. IDEOLOGI DAN  
BELA NEGARA

  
**KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos**

  
**SIANE FRANSIEN TAGA, S.Sos**

Pembina Tkt I

Penata Tkt I

Nip 19700526 199303 1 004

Nip 19690615 200701 2 051

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IRFAN LIBUKA, S.Sos**

Jabatan : Plh. Ka. Sub. Bid. Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2022

**PIHAK KEDUA**

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN  
WAWASAN KEBANGSAAN

**KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos**

Pembina Tkt I

Nip 19700526 199303 1 004

**PIHAK PERTAMA**

**IRFAN LIBUKA, S.Sos**

Penata

Nip 19810513 200801 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN  
KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
1	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5 Dokumen
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan di Bidang Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan sesuai Permendagri No. 34 Tahun 2006, Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang
4.		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang
5.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta tersedianya Laporan Situasi dan Kondisi daerah dalam pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan

## KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUBBID. WAWASAN KEBANGSAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>			
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 459.399.900	
<b>Sub Kegiatan :</b>			
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 3.365.500	
2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 6.376.000	
3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 128.543.725	
4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 136.013.050	
5.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 185.101.625	

Palu, 2022

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN  
WAWASAN KEBANGSAANPlh. KASUB.BID. WAWASAN  
KEBANGSAAN

  
KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos


  
IRFAN LIBUKA, S.Sos

Pembina Tkt I

Penata

Nip 19700526 199303 1 004

Nip 19810513 200801 1 011



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KA. SUB. BID. KEWASPADAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI MUSDALIFAH, S.Pd. SH., M.Si**  
Jabatan : Ka. Sub. Bid. Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SURYA, M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan : Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2022

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN**

  
**Dra. SURYA, M.Si**  
Pembina Tkt I  
Nip 19650330 198610 2 005

**PIHAK PERTAMA**

  
**ANDI MUSDALIFAH, S.Pd. SH., M.Si**  
Pembina  
Nip 19730125 199703 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KA. SUB. BID. KEWASPADAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
I		Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	5 Dokumen
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersusunnya dokumen program kerja sub bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Wilayah Perbatasan Antar Negara, Provinsi, Kab/Kota dan Fasilitasi Kelembagaan Sub Bidang Kewaspadaan.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing di Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 orang
3.	Terselenggaranya kegiatan peningkatan Kewaspadaan di wilayah perbatasan antar Provinsi, Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 orang
4.	Tersusunnya 4 laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	4 Laporan

	Pelaporan serta Matwas di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
5.	Tersusunnya 4 dokumen (laporan) hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 Dokumen

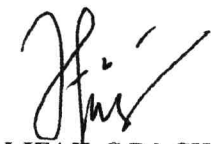
KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB. BID. KEWASPADAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>			
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 531.997.375	
<b>Sub Kegiatan :</b>			
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 2.317.000	
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 86.773.850	
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 50.851.500	

4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 167.745.450	
5.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rp. 108.868.175	


  
**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN**  
**Dra. SURYA, M.Si**  
 Pembina Tkt I  
 Nip 19650330 198610 2 005

Palu, 2022  
**KASUB.BID. KEWASPADAAN**

  
**ANDI MUSDALIFAH, S.Pd. SH., M.Si**  
 Pembina  
 Nip 19730125 199703 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KA. SUB. BID. PENANGANAN KONFLIK PEMERINTAHAN DAN SOSIAL  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SOFYAN DG. RIAYA, S.Sos., M.A.P**

Jabatan : Plh. Ka. Sub. Bid. Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SURYA, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan : Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2022

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN

**Dra. SURYA, M.Si**  
Pembina Tkt I  
Nip 19650330 198610 2 005

**PIHAK PERTAMA**

**SOFYAN DG. RIAYA, S.Sos., M.A.P**  
Penata Tkt I  
Nip 19830912 200502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KA. SUB. BID. PENANGANAN KONFLIK PEMERINTAHAN DAN SOSIAL**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
1		Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	5 Dokumen
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya Dokumen Program Kerja Sub Bidang Penanganan Konflik, Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
2.	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen
3.		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUBBID. PENANGANAN KONFLIK PEMERINTAHAN  
DAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>			
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 531.997.375	
<b>Sub Kegiatan :</b>			
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 2.216.900	
2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 19.216.025	
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 94.008.475	

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN



**Dra. SURYA, M.Si**  
Pembina Tkt I

Nip 19650330 198610 2 005

Palu, 2022

Plh. KASUB.BID. PENANGANAN  
KONFLIK PEMERINTAHAN  
DAN SOSIAL



**SOFYAN DG. RIAYA, S.Sos., M.A.P**  
Penata Tkt I  
Nip 19830912 200502 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KA. SUB. BID. KETAHANAN KEMASYARAKATAN DAN AGAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWAN DUWILA, S.Sos**

Jabatan : Ka. Sub. Bid. Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DARMOLI A. DAEPATOLA, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan  
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :  
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2022

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA BIDANG KETAHANAN  
EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN  
KEMASYARAKATAN  
  
**Drs. DARMOLI A. DAEPATOLA, M.Si**  
Pembina Tkt I  
Nip 19640818 199003 1 011

**PIHAK PERTAMA**  
  
**IRWAN DUWILA, S.Sos**  
Penata Tkt I  
Nip 19711224 200212 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2022**  
**KA. SUB. BID. KETAHANAN KEMASYARAKATAN DAN AGAMA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

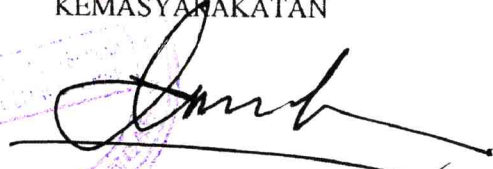
No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
I	Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5 Dokumen
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 orang
4.	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 orang
5.	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUBBID. KETAHANAN KEMASYARAKATAN DAN  
AGAMA TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 5.720.085.575
<b>Sub Kegiatan :</b>		
1.	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 3.324.000
2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 3.010.500
3.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 5.436.705.475
4.	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 142.195.975
5.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 134.849.625

Palu, 2022

KEPALA BIDANG KETAHANAN  
EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN  
KEMASYARAKATAN

  
**Drs. DARMOLI A. DAEPATOLA, M.Si**

Pembina Tkt I  
Nip 19640818 199003 1 011

KASUB.BID. KETAHANAN  
KEMASYARAKATAN DAN AGAMA

  
**IRWAN DUWILA, S.Sos**

Penata Tkt I  
Nip 19711224 200212 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KA. SUB. BID. KETAHANAN EKONOMI, SENI DAN BUDAYA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **APRIANI YERLIN, SE, MM**

Jabatan : Ka. Sub. Bid. Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DARMOLI A. DAEPATOLA, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan  
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2022

**PIHAK KEDUA**

KEPALA BIDANG KETAHANAN  
EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN  
KEMASYARAKATAN

**Drs. DARMOLI A. DAEPATOLA, M.Si**

Pembina Tkt I

Nip 19640818 199003 1 011

**PIHAK PERTAMA**

**APRIANI YERLIN, SE, MM**

Pembina

Nip 19770420 200112 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KA. SUB. BID. KETAHANAN EKONOMI, SENI DAN BUDAYA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sasaran Kegiatan :</b>			
1	Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5 Dokumen
<b>Sasaran Sub. Kegiatan :</b>			
1.	Tersedianya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 orang
4.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 orang
5.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUBBID. KETAHANAN EKONOMI DAN SENI BUDAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>Kegiatan :</b>		
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 338.013.975
<b>Sub Kegiatan :</b>		
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 2.892.800
2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 3.038.000
3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 72.583.950
4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 63.575.875
5.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 195.923.350

Palu, 2022

KEPALA BIDANG KETAHANAN  
EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN  
KEMASYARAKATAN

  
**Drs. DARMOLI A. DAEPATOLA, M.Si**

Pembina Tkt I  
Nip 19640818 199003 1 011

KASUB.BID. KETAHANAN EKONOMI  
SENI DAN BUDAYA

  
**APRIANI YERLIN, SE, MM**

Pembina  
Nip 19770420 200112 2 002

## Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah, 24 Mei 2022 di Kota Palu.



## Kegiatan Outbond Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Bagi Generasi Muda di Kota Palu Tanggal 14 Desember 2022





**Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemerintahan Umum Senin, 12 Desember 2022 di Swissbell Hotel Palu**





**Kegiatan Forum Komunikasi Politik 3 November 2022  
Hotel Bumi Harapan Kab. Toli-Toli**



**Kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia, 21 Juli 2022  
Best Western Hotel, Jl. Basuki Rahmat Palu**



**Kegiatan Forum Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Partai Politik pada Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2022  
Senin, 17 Oktober 2022 Hotel Oktaria Masigi, Parigi**



**KEGIATAN BIMTEK APLIKASI PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORMAS TAHUN 2022 DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANGGAI**



**KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ORMAS DI KOTA PALU**



KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANGGAI



**KEGIATAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN KETAHANAN EKONOMI**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah





KEGIATAN FORKOM PELESTARIAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN 2022